



## Lima Proyek Drainase Dibatalkan

**BANTUL**—Pembatalan lima proyek drainase yang telah masuk dalam pengajuan lelang pada laman LPSE batal dilaksanakan menyusul efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat untuk mengurangi alokasi transfer keuangan daerah senilai Rp21,7 miliar.

Jumali  
jumali@harianjogja.com

Sekretaris Daerah Bantul Agus Budiraharja mengatakan Sekretariat Daerah telah mendapatkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No.29/2025 tentang pencoretan alokasi Transfer Keuangan Daerah senilai Rp21,7 miliar untuk Bantul.

Pencoretan itu terdiri dari Dana

- ▶ Otomatis untuk proyek drainase dan irigasi senilai Rp5,3 miliar tidak jadi dilaksanakan.
- ▶ Pemkab harus membuat penyesuaian anggaran terlepas dari pencoretan alokasi Transfer Keuangan Daerah.

Alokasi Umum (DAU) spesifik bidang pekerjaan umum Rp16,3 miliar dan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang irigasi senilai Rp5,3 miliar.

"Otomatis untuk proyek drainase dan irigasi senilai Rp5,3 miliar tidak jadi dilaksanakan meski proses pengadaan barang dan jasa sudah mulai dilakukan," tuturnya di Ruang Sekda Bantul, Rabu (12/2).

Berdasarkan laman LPSE, kelima proyek drainase yang sempat diproses tersebut adalah proyek irigasi di Sindet, irigasi di Pacar, irigasi di Jotawang,

### 5 PEMBATALAN PROYEK IRIGASI



❑ Irigasi Sindet  
Anggaran Rp891,9 juta

❑ Irigasi Pacar  
Anggaran Rp515,1 juta

❑ Irigasi Jotawang  
Anggaran Rp2 miliar

❑ Irigasi Timbulsari  
Anggaran Rp891,9 juta

❑ Irigasi Kemiri  
Anggaran Rp739,6 juta

Sumber: Sekretariat Daerah Bantul (Jum)

irigasi di Timbulsari dan proyek irigasi di Kemiri.

Sementara untuk DAU spesifik bidang pekerjaan umum Rp16,3 miliar, Agus menyatakan akan melakukan penyesuaian dan perubahan pada pos penerimaan alokasi Transfer Keuangan Daerah. Sebab, saat ini belum dilakukan perubahan pada APBD 2025 utamanya pada penerimaan DAU Spesifik Bidang Pekerjaan Umum Rp16,3 miliar.

Selain itu, Sekda menyebut Pemkab harus membuat penyesuaian anggaran terlepas dari pencoretan alokasi Transfer Keuangan Daerah senilai Rp21,7 miliar.

Adapun, besaran persentasenya masih menunggu kejelasan lanjutan dari Pemerintah Pusat.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bantul Trisna Manurung menambahkan, sampai saat ini instansinya masih menunggu kejelasan item dan besaran pengurangan dana untuk kegiatan organisasi perangkat daerah (OPD) dari Pemerintah Pusat.

"Refokus anggaran sudah dihitung tapi Pemkab menunggu legalitasnya agar semua jelas. Sejauh ini belum ada regulasi dan legalitasnya dari Pusat," ujarnya.